

Haruskah Putra Daerah Menjadi Kepala Daerah?

Bintang Putra Hidayat¹
Prodi Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Indonesia

Putra daerah adalah seseorang yang memiliki garis keturunannya murni dari daerah di mana dia dilahirkan tersebut, misalnya Putra daerah Alor, garis keturunan kakek, bapak dan ibu harus dari Alor dan dia dilahirkan di Alor, meskipun dia tidak besar di Alor (Isu pendatang vs putra daerah, www.bongkar.co.id, 10 Oktober 2009).

Istilah tentang putra daerah yang lainnya adalah berdasarkan ikatan primordial, kedekatan kultur, lokalitas, dan kejiwaan, maka seorang “putra/putri daerah” diasumsikan akan memiliki kepedulian yang lebih besar terhadap daerahnya dibandingkan dengan orang “non putra/putri daerah.”

Contoh sederhana saja: dalam pertandingan atau perlombaan PORDA (Pekan Olah Raga Daerah) Sulawesi Tengah, orang Palu tanpa diminta akan mengelu-elukan atlet atau tim yang mewakili Palu, sebagaimana juga orang Banggai atau Banggai Kepulauan tanpa dibayar akan tetap membanggakan atlet yang mewakili Banggai atau Banggai Kepulauan, karena ikatan-ikatan primordial, kultur, lokalitas, dan kejiwaan (Meletakan Wacana “Caleg Impor” Pemilu 2004, Hendra Umar, S.Ag dan Moh. Ali M. Mogel, www.radarsulteng.com, 9 Oktober 2009).

Geliat primordialisme ini juga terjadi dalam agenda pemilihan Calon Legeslatif di Surabaya. Dengan dukungan dari kalangan LSM mereka kini giat untuk mengkampanyekan calon legeslatif dari putra daerah. Caleg putra daerah ini dianggap memiliki komitmen yang kuat dengan konstituen yang diwakilinya, (LSM Kampanyekan Caleg Putra Daerah, www.surya.co.id, 10 Oktober 2009).

Diskusi tentang pro dan kontra siapa yang pantas untuk memimpin suatu daerah hampir selalu menghiasi setiap pemilihan kepala daerah. Biasanya berpusat pada argumen generik bahwa yang terbaik bagi sebuah daerah adalah memiliki pemimpin yang berasal dari daerah itu karena memiliki tanggung jawab moral.

Sekarang yang menjadi pertanyaan apakah masyarakat akan benar-benar mendukung putra daerah untuk menjadi kepala daerah? Menurut penulis siapa pun yang menjadi kepala

¹ Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, angkatan 2008

daerah, boleh saja, entah dia putra daerah ataupun luar daerah, sebab kita melihat dari kepemimpinannya bukan dari asalnya. Untuk apa dia putra daerah tapi kalau dia tidak punya hati dan tanggungjawab moral membangun daerah yang dipimpinnya, untuk apa dia putra daerah tapi KKN nya minta ampun, Untuk apa dia putra daerah kalau dia itu tidak bisa memimpin?. Apakah dengan bupatinya putra daerah otomatis sebuah daerah setingkat kabupaten bisa kian maju?.

Bagi Penulis, pro dan kontra putra daerah versus bukan putra daerah, boleh jadi penting tetapi juga kurang penting, pasalnya yang terpenting bagi kita adalah kelayakan atau kapasitas seorang pemimpin. Karena sesuatu kekuatan itu bersumber dari apa yang dinamakan kepemimpinannya, contohnya dengan semangat yang membara Ir. Soekarno dapat membuat para pemuda dan pejuang kemerdekaan untuk bersemangat melawan para penjajah dan dapat merebut kemerdekaan Indonesia ditahun 1945.

Tulisan ini bukan bermaksud untuk menggurui atau mengintimidasi semua yang mengaku putra daerah, akan tetapi mengingatkan bahwa kita ini adalah kesatuan utuh baik dari banyaknya suku, perbedaan agama, kita disatukan dengan cara merdeka bukan dimerdekakan atau diberi kemerdekaan dari bangsa lain.

Jadi jangan hanya memikirkan kepentingan pribadi maupun golongan semata akan tetapi utamakanlah untuk bangsa Indonesia ini yang akan rindu dengan namanya kedamaian. Tugas utama setiap yang terpilih menjadi Kepala Daerah sampai Kepala Pemerintahan adalah mampu tidaknya mewujudkan perubahan menuju keadaan yang lebih baik dari sebelumnya dan memberikan citra positif akan tanggung jawab moral serta harus melaksanakan amanah, bukan hanya obral janji-janji semata, karena masyarakat kita setiap hari tampak semakin cerdas.